



LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN 2019



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248

KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan, sekaligus merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan laporan pelaksanaan hasil kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 yang merupakan tahun empat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2017-2022.

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2009 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian Laporan Kinerja menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal, dengan harapan ada perbaikan di masa mendatang.

Singaraja, 02 Januari 2020.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



EGEDE SANDHIYASA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650704 198601 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat berorientasi kepada visi, misi dan tujuan suatu organisasi, dengan memperhitungkan kekuatan, hambatan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin terjadi. Penyelenggaraan program kegiatan di bidang/urusan sosial pada Dinas Sosial sebagaimana ditetapkan Penetapan Kinerja tahun 2019.

Penetapan kinerja memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat operasional, dengan mengacu pada Renstra 2017-2022 dan Rencana Kerja tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa 3 sasaran tercapai dengan predikat sangat berhasil. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran di bidang sosial antar lain :

1. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Dinas Sosial Provinsi Bali , Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Polsek, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga kesejahteraan sosial lainnya .
2. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna, LKS/Orsos, LK3 dan Dunia Usaha.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, WKSBM, Forum Komunikasi Panti Asuhan.

Meskipun pencapaian sasaran relatif berhasil, namun demikian masih terdapat permasalahan sosial yang menjadi tantangan, diantaranya adalah :

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih relatif besar dengan permasalahan yang semakin kompleks.
2. Belum adanya keterpaduan data, khususnya dalam penanganan kemiskinan, antara data kemiskinan melalui TNP2K serta Data BDT Tahun 2017 dari Kementerian Sosial RI.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
B. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
B. REALISASI ANGGARAN	20
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN	
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL TAHUN 2019	
2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019	
3. PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2016 tanggal, 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok :

” Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial ” yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial yang berhubungan dengan :

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terdiri atas :

1. Kepala Dinas (Eselon II/b)
2. Sekretaris (Eselon III/a) , dibantu 2 Sub Bagian :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan (Eselon IV/a)
 - b. Sub. Bagian Umum dan Keuangan (Eselon IV/a)
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Eselon III/b), dibantu 3 Seksi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (Eselon IV/a)
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Eselon III/b), dibantu 3 Seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Rehabilitasi Tunas Sosial (Eselon IV/a)
5. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Eselon III/b) 1, dibantu 3 Seksi :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca bencana (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Eselon IV/a)
6. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Monumen dan Tugu Perjuangan (Eselon IV/a), dibantu:
 - a. Kepala Tata Usaha UPT Monumen dan Tugu Perjuangan (Eselon IV/b)

C. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD :

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Bupati; Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial; Pelaksanaan rehabilitasi penyandang permasalahan sosial; Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial; Pemberian perijinan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan baik yang menyangkut pelayanan sosial, pemberdayaan lembaga sosial maupun pembinaan karang taruna serta yang berkaitan dengan penataan dan pelestarian monumen serta penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya penanganan Isu Strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.

Program dan kegiatan tersebut akan menjawab terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Buleleng terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial maupun pencapaian SDGs dalam penanggulangan kemiskinan .

Kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial / Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia

terlantar, keluarga miskin, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan, untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan seterusnya .

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruhan wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan . Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap , terpadu dan berkesinambungan dengan SKPD/ Lembaga terkait .

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali (Jatim) tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial;
- c. Penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dll) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya;
- d. Rentannya wilayah Buleleng terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud.
- e. Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng , orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan) .

- f. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan ataupun di stop karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya.

Adapun peluang dimaksud adalah :

- a. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah sosial.
- b. Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik Dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2017-2022, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 .

Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan sosial yang menjadi Urusan Sosial yang ada di Kabupaten Buleleng.

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan menjadi tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu “ Meningkatkan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat miskin “ melalui :

1. Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian , keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :
 - Meningkatnya Efektifitas Pelayanan terhadap PMKS, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Peningkatan PMKS yang Mapan, dengan target : 20 PMKS
 - b. Prosentase (%) Penurunan Jumlah PMKS , dengan target : 4.00 %
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial , dengan Sasaran Startegis :
 - Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Prosentase (%) Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial. , dengan target : 15 %
3. Meningkatnya nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial , dengan Indikator Kinerja :
 - a. Prosentase (%) Peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. dengan target : 18 %

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS SOSIAL
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T (%)	PROGRAM
1	<i>Sasaran 1</i> Meningkatnya kualitas hidup kemandirian, keefungsian sosial dan kesejahteraan penyandang masalah	Persentase penurunan keluarga miskin	4.00%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
		Persentase penurunan lanjut usia terlantar	4.00%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Persentase penurunan anak terlantar	4.00%	Program Pembinaan Anak Terlantar
		Persentase penurunan penyandang disabilitas	4.00%	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma
		Persentase penurunan tuna sosial	4.00%	Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
		Persentase penurunan keluarga miskin	4.00%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Persentase korban bencana yang puas dalam penanganan bencana sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP)	100%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	<i>Sasaran 2</i> Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan	Persentase Panti Asuhan/Jompo yang berfungsi baik	100%	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
		Persentase kelembagaan sosial yang berpartisipasi aktif dalam penanganan	15%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

	sosial bagi PMKS	PMKS.		
3	<u>Sasaran 3</u> Meningkatnya nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	18%	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019 yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
<i>Sasaran 1</i> Meningkatnya kualitas hidup kemandirian, kebefungsian sosial dan kesejahteraan penyandang masalah	Persentase PMKS yang tertangani	4.00 %	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	481.500.000
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	578.199.700
			Program Pembinaan Anak Terlantar	241.500.300
			Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	569.700.000
			Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	188.600.000
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	844.800.000
<i>Sasaran 2</i> Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS	Prosentase (%) peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial.	15%	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	195.000.000
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	226.500.000

<i>Sasaran 3</i> Meningkatnya nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Prosentase (%) nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	18 %	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	1.382.750.000
---	---	------	--	---------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	a. Persentase PMKS yang tertangani. b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

		2. Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
--	--	--	---

Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi :

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100%	: Sangat berhasil
Capaian kinerja >70 sd <85%	: Berhasil
Capaian kinerja >55 sd <70%	: Cukup berhasil
Capaian kinerja < 55 sd 0%	: Tidak berhasil

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 :

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Tahun 2019 dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1.	Persentase PMKS yang tertangani	4.00	7,02	175%

2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	15,40	6,33	41,10%
----	--	-------	------	--------

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2019 dengan skala kriteria diperoleh dengan predikat **sangat baik**. Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	URAIAN	CAPAIAN IKU
1.	Persentase PMKS yang tertangani	$= \frac{\sum PMKS \text{ yang tertangani}}{\sum PMKS \text{ yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{\sum 3.399}{\sum 48.409} \times 100\%$ $= 7,02 \%$
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$= \frac{\sum PMKS \text{ yang diberikan bantuan}}{\sum PMKS \text{ yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$ $= \frac{\sum 3.065}{\sum 48,409} \times 100\%$ $= 6,33 \%$

Realiasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2019, dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,61	0,61	100%

2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80	80	100%
----	--	----	----	------

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2019 dengan skala kriteria diperoleh dengan predikat **sangat baik**. Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	URAIAN	CAPAIAN
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$\frac{\sum \text{PMKS penerima bantuan UEP}}{\sum \text{Jumlah PMKS Tahun sekarang}} \times 100\%$ $= \frac{\sum 295}{\sum 48.409} \times 100\%$ $= 0,61\%$
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	$\frac{\sum \text{PSKS yang aktif}}{\sum \text{Jumlah PSKS Tahun sekarang}} \times 100\%$ $= \frac{\sum 666}{\sum 831} \times 100\%$ $= 80 \%$

2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, untuk capaian realisasi tahun 2018 – 2019 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian 2019
1.	Persentase PMKS yang tertangani	79,37	175%
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	96,38	41,10%

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2018-2019, maka rata-rata capaian kinerja dan realisasi kinerja 87,87 sampai 108,05% yaitu dari tahun 2018-2019 sesuai target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran “Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin meliputi 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,91%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin**.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Target 2020
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Prosentase PMKS yang tertangani	2,70	4,00	7,02	175%	4,60
2.	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12,34	15,40	6,33	41,10%	18,00

a. Persentase PMKS yang tertangani

Realisasi pencapaian Prosentase PMKS yang tertangani sebesar 7,02%, diperoleh dari jumlah PMKS yang tertangani (3.399 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada (48.409 Orang) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 175 %.

b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Realisasi pencapaian Prosentase PMKS yang diberikan bantuan 6,33%, diperoleh dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan (3.065 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (48.409 orang) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 41,10%.

Sasaran “Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Target 2020
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	0,61	0,61	100%	0,63

a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Realisasi pencapaian Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 0,61%, diperoleh dari jumlah PMKS penerima bantuan UEP (295 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS tahun sekarang (48.409 Orang) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 100 %.

Sasaran “Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif meliputi 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Target 2020
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	-	80	80	100%	80

a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Realisasi pencapaian Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif sebesar 80%, diperoleh dari jumlah PSKS yang aktif (666) dibandingkan dengan jumlah PSKS tahun sekarang (831) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 100%.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
5. Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial
8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
9. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- a. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga sosial.

- b. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Tenaga Kersejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana, Karang Taruna, LKS, LK3 dan dunia usaha.
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, WKSBM, Forum Komunikasi Panti Asuhan (Forkapa), Corporate Social Responsibility (CSR) Dunia Usaha, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dharma Bhakti – Buleleng, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.
 - d. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Bali, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain :
 - a. Belum adanya keterpaduan data, khususnya dalam penanganan kemiskinan, antara data kemiskinan yang diterbitkan BPS dan hasil pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Buleleng.
 - b. Terbatasnya sumberdaya pelaksana kegiatan penanganan PMKS.
 - Berkaitan dengan permasalahan tersebut, upaya/ alternative yang dilakukan antara lain :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi data PMKS, dalam hal ini data KK miskin terkait dengan Program Perlindungan Sosial dengan TKPK Kabupaten Buleleng dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
 - b. Mengoptimalkan kinerja sumberdaya pelaksana dan meningkatkan kerjasama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian Kinerja Organisasi tidak terlepas dari potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa :

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang ada yang terdiri dari 29 orang tenaga PNS dan dibantu 104 orang tenaga kontrak kerja sebagai tenaga administrasi pada kegiatan dan tenaga cleaning service, tukang kebun, serta sopir. Tenaga tukang kebun dibutuhkan

sebanyak 41 orang bertugas di Monumen/Tugu Perjuangan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial antara lain : Monumen Jagaraga, Taman Makam Pahlawan “Curastana”, Monumen Tri Yudha Sakti, Monumen Ayodya Pura di Selat, Monumen Bhuana Kertha, Tugu Perjuangan Wira Bhuana di Gitgit .

- b. Kurangnya tenaga yang memiliki pendidikan pekerjaan sosial khususnya dalam rangka penanganan masalah sosial yang membutuhkan teori social worker.

6. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja.

Dari 9 Program Wajib dan 53 Kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, pada dasarnya secara keseluruhan telah mendukung terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019. Namun ada kegiatan yang secara kuantitatif belum tercapai realisasi target fisiknya 100% yaitu kegiatan Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa , ini disebabkan karena target pemulangan orang terlantar sebanyak 3 orang dan teralisasi 0 orang selain itu target penguburan mayat terlantar sebanyak 5 orang namun jumlah kasus mayat terlantar hanya ada 4 orang sehingga terjadi penurunan capaian target fisik untuk kasus - kasus keterlantaran hal ini menandakan bahwa kondisi di Kabupaten Buleleng cukup aman terhadap kasus- kasus keterlantaran.

B. REALISASI ANGGARAN

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
1.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	481.500.000	477.597.998	99,24 %
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	578.199.700	570.706.536	98,66 %
		Program Pembinaan Anak Terlantar	241.500.300	240.439.174	99,56 %
		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	195.000.000	190.945.122	98,00 %
		Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	188.600.000	183.219.768	97,45 %
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	226.500.000	224.077.966	98,87 %

		Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	1.382.750.000	1.374.274.077	99,20 %
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	844.800.000	840.615.645	99,44 %
		Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	569.700.000	559.994.054	97,15 %

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana diuraikan dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja , secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, serta mengarah kepada pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yakni ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”***.

Namun demikian, terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai yang akan diupayakan perbaikannya. Penataan ulang terhadap perancangan program dan kegiatan di tahun mendatang yang mengarah pada penanganan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama.

Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini di masa mendatang.

Lampiran 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL
TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya efektifitas Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p>a. Cara Pengukuran: (Jumlah PMKS tahun sebelumnya dikurangi jumlah PMKS tahun sekarang) di bagi jumlah PMKS tahun sebelumnya di kalikan 100%</p> <p>b. Tipe penghitungan : Mandiri per tahun</p> <p>c. Sumber data : Dinas Sosial</p> <p>d. Alasan: Sesuai Dengan</p> <ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor: 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial2. Permensos : 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)

Lampiran 2
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran 1: Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	a. Prosentase PMKS yang tertangani.	4	3,99	99,82
	b. Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	15,40	15,40	100

Lampiran 3
PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
<i>Sasaran 1</i> Meningkatnya efektivitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4,0%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.387.055.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	321.913.000
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	63.982.000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98.500.000
			Program Perencanaan Anggaran SKPD	200.000.000
			Program Informasi Pembangunan Daerah	45.000.000
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	481.500.000
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	578.199.700
			Program Pembinaan Anak Terlantar	241.500.300
			Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	195.000.000
			Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	188.600.000
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	226.500.000
			Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	1.382.750.000
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	844.800.000
Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	569.700.000			